

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laba pada sebuah emiten seringkali dipakai guna proses pengambilan sebuah keputusan dalam analisa laporan keuangan, seperti pemberian kompensasi, pemberian bonus, ukuran prestasi manajemen dan penentuan besarnya pajak yang akan dibayarkan perusahaan (Endriati, Hidayati, & Junaidi, 2017). Laba merupakan salah satu elemen terpenting karena informasi ini akan digunakan baik oleh pihak internal manajemen serta investor dan juga bank sebagai pihak eksternal dalam proses pengambilan keputusan dikarenakan sebuah laba mencerminkan hasil kinerja sebuah emiten.

Apabila emiten mampu meningkatkan jumlah laba dari waktu ke waktu, maka emiten tersebut dapat dinilai memiliki kinerja yang baik. Laba adalah jumlah pendapatan setelah dikurangi dengan jumlah beban (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015). Tetapi semakin tinggi keuntungan yang didapat oleh sebuah emiten, maka beban pajak yang dimiliki juga semakin tinggi. Laba digunakan dalam menghitung PKP (Penghasilan Kena Pajak) dengan perhitungan laba neto fiskal dikurang kompensasi rugi fiskal.

Dalam UU RI Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, memberikan penjelasan terkait pajak yang merupakan kontribusi wajib terutang secara perseorangan maupun badan kepada suatu negara yang sifatnya memaksa, tanpa adanya imbalan yang diberikan langsung. Pajak yang telah dibayarkan tersebut akan dipakai guna kepentingan negara untuk kemakmuran warga negara tersebut.

Semua perusahaan yang berdiri dan beraktivitas di Indonesia yang berstatus WP Badan (Wajib Pajak Badan) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) berkewajiban untuk membayar pajak. Pajak penghasilan akan dikenakan pada pendapatan/ penghasilan yang didapat perusahaan dalam satu tahun pajak. Semakin tinggi laba yang didapatkan, perusahaan juga harus membayar beban pajak yang semakin tinggi.

Pajak yang merupakan sebuah kewajiban bagi seorang warga negara yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga banyak WP yang melihat pajak adalah sebuah beban pengeluaran yang ingin dihindari atau diperkecil jumlahnya baik dengan memanipulasi laba yang didapat atau biasa disebut manajemen laba. Fitriany (2016) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan sebuah usaha yang dilaksanakan manajemen perusahaan guna memanipulasi informasi akuntansi yang akan digunakan oleh pihak luar perusahaan yang bertujuan guna menguntungkan diri sendiri menggunakan teknik merubah atau bersikap tidak acuh pada standar yang berlaku sehingga informasi yang dicatatkan tidak benar. Legalitas penerapan manajemen laba ini menjadi persoalan bagi pihak-pihak tertentu, dikarenakan sebagian pihak yang menganggap hal tersebut merupakan kecurangan, sedangkan ada pihak lain juga yang berpendapat bahwa yang dilakukan oleh pihak manajemen sebuah emiten tersebut masih dalam standar akuntansi yang berlaku dengan memberlakukan prosedur akuntansi yang diterima sehingga hal tersebut bukan merupakan kecurangan. Terdapat 2 jenis manajemen laba yaitu manajemen laba riil dan akrual. Manajemen laba riil merupakan rekayasa keuntungan perusahaan dengan kegiatan riil dari emiten. Sedangkan manajemen laba akrual merupakan rekayasa keuntungan dengan kegiatan akrual contohnya melalui pemilihan penggunaan metode akuntansi. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada manajemen laba akrual.

Dalam Informasi APBN 2021 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, tercatat pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 T dan didominasi oleh pendapatan pajak sebesar Rp1.444,5 T, sisanya didapat dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp298,2 T dan juga hibah sebesar Rp0,9 T. Diberbandingkan dengan APBN periode 2020, pendapatan negara meningkat sebesar Rp43,7 T atau sebesar 2,6% yang sebelumnya tercatat Rp1.699,9 T, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.404,5 T.

Dapat kita lihat bahwa perekonomian Indonesia sudah menunjukkan proses pemulihan dengan ditopang oleh penerimaan perpajakan. Pertumbuhan ini dikarenakan pemerintah fokus kepada kebijakan yang dapat mendukung pulihnya ekonomi negara serta reformasi dapat berlanjut. Apabila kita lihat 5 tahun kebelakang, tahun 2016-2019

rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak untuk APBN adalah 6,4% dan hal ini selaras dengan peningkatan ekonomi negara serta harga komoditas. Lalu pada periode 2020, dikarenakan pandemi COVID-19, penerimaan pajak terkoreksi sebanyak 9,2%. Dan pada tahun 2021 pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak yaitu 2,9% yang berjalan bersama dengan perekonomian yang meningkat. Target pajak pada tahun ini sebesar Rp1.229,6 triliun yang diperoleh dari PPh sebesar Rp683,8 triliun, PPN dan PPhBM sebesar Rp518,5 triliun, PBB Rp14,8 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp12,4 triliun.

Pajak yang merupakan penopang APBN, secara konsisten didorong oleh pemerintah untuk bisa memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Indonesia memiliki beberapa jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya yaitu PPh badan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), badan merupakan kelompok individu/ modal yang adalah kesatuan dalam kegiatan usaha ataupun bukan kegiatan usaha. PT, CV (Curriculum Vitae), perseroan lainnya, BUMN, BUMD yang menggunakan identitas atau bentuk kelembagaan, firma, sekutu, massa, *foundation*, perusahaan merupakan contoh badan. Tarif yang ditetapkan untuk PPh Badan yaitu 25% atas PKP (Penghasilan Kena Pajak) berdasarkan Undang-Undang.

Emiten melakukan praktik perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak dengan menurunkan jumlah laba yang dicatatkan, sehingga dengan menurunnya kewajiban pajak perusahaan tersebut dapat menambah keuntungan perusahaan atau biasa disebut praktik manajemen laba.

Dalam penelitian yang sudah dijalankan oleh Sutrisno (2018) dinyatakan fakta insentif non pajak juga mempengaruhi keputusan untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan memberikan insentif non pajak dalam rangka peningkatan produktivitas pekerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan juga loyalitas karyawan. Smith & Watts (1982) menyatakan rencana kompensasi eksekutif perusahaan sering kali mencakup ketentuan yang tujuannya adalah untuk mendorong eksekutif dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Rencana ini secara formal mengikat kompensasi eksekutif dengan beberapa ukuran kinerja perusahaan.

Insentif non pajak yang diberikan oleh perusahaan biasanya akan didapatkan apabila karyawan mencapai target atau prestasi tertentu. Dengan adanya prestasi atau target tertentu yang ditetapkan perusahaan untuk karyawan bisa menerima insentif, hal ini tentunya memacu karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Contoh insentif non pajak yang diberikan oleh beberapa perusahaan seperti bonus, *stock option*, *profit sharing*, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan hasil kinerjanya, dalam banyak kasus, manajemen melakukan praktik manajemen laba guna meningkatkan laba perusahaan atau tingkat profitabilitas supaya dapat memperoleh insentif tersebut, atau peningkatan laba juga dapat dicapai dengan menurunkan nilai beban utang yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini, insentif non pajak dalam pengaruhnya atas manajemen laba diukur dengan variabel *leverage* dan profitabilitas. Rasio *leverage* mencerminkan nilai aset emiten yang dibayar oleh utang. Semakin besar rasio *leverage* dari suatu emiten, maka resiko yang ditanggung investor juga bertambah besar. Dharma & Wirama (2020) menyatakan perubahan dalam *leverage* bisa menjadi indikasi adanya keputusan manajemen untuk memperbesar nilai laba perusahaan. Melalui peningkatan *leverage* secara terus-menerus memotivasi manajemen perusahaan untuk menerapkan praktik manajemen laba supaya tidak melanggar kontrak hutang. Perusahaan dengan *leverage* lebih besar, memiliki resiko lebih besar dalam pemenuhan kewajibannya tepat waktu dan melanggar kontrak.

Adapun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa laba yang diperoleh perusahaan digunakan sebagai tolok ukur oleh pihak eksternal dalam mengambil keputusan. Sehingga nilai profitabilitas yang kecil, bisa memotivasi manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan penelitian terhadap pengaruh perencanaan pajak serta insentif non pajak atas manajemen laba dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Insentif Non Pajak terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”.

Penelitian ini hendak menguji sampel perusahaan properti yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, pada penelitian ini menggunakan proksi perencanaan pajak serta untuk pengukuran pengaruh insentif non pajak atas manajemen laba, pada penelitian ini akan menggunakan proksi *leverage* serta profitabilitas. Penelitian ini dilaksanakan atas perusahaan terbuka dikarenakan manajemen laba lebih berpotensi terjadi pada perusahaan yang sudah cukup besar.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah perencanaan pajak memberikan pengaruh atas manajemen laba?
2. Apakah *leverage* memberikan pengaruh atas manajemen laba?
3. Apakah profitabilitas memberikan pengaruh atas manajemen laba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan ditulisnya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh perencanaan pajak atas manajemen laba emiten manufaktur yang ada di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2017-2019.
2. Untuk memahami pengaruh *leverage* atas manajemen laba emiten manufaktur yang ada di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2017-2019.
3. Untuk memahami pengaruh profitabilitas atas manajemen laba emiten manufaktur yang ada di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2017-2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis, penelitian ini diharapkan supaya berguna secara teoritis, mengembangkan pengetahuan serta wawasan pembaca, dan juga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi guna penelitian kedepannya.

2. Praktis, penelitian ini diharapkan untuk bisa digunakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sejalan dengan tujuan penelitian, penulis menerapkan batasan-batasan masalah dibawah ini:

1. Penelitian ini akan berfokus pada 3 variabel independen yaitu, perencanaan pajak, *leverage*, serta profitabilitas.
2. Periode penelitian ini yaitu 2017-2019.
3. Populasi yang ada dipenelitian ini merupakan laporan keuangan emiten sektor manufaktur pada Bursa Efek Indonesia pada 2017-2019.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Penyusunan tugas akhir ini disusun secara sistematis dengan dibagi kepada 5 bagian, yang adalah:

- **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

- **BAB II. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini akan menjelaskan definisi konsep dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini, telaah literatur yang sesuai dengan variabel yang akan diuji, kerangka konseptual, serta juga pengembangan hipotesis.

- **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini hendak mengkaji populasi, sample, serta sumber data yang hendak dipakai pada pengujian, teknik untuk mengumpulkan data yang akan diteliti, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, metode untuk menganalisa data.

- **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini hendak mengkaji hasil penelitian (hasil uji hipotesis, deskripsi statistik, hasil uji model penelitian, dan korelasi antar variabel).

- **BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan memberi kesimpulan atas penelitian yang sudah dilaksanakan serta saran yang akan berguna untuk penelitian berikutnya.

